

**REVISI RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
DOLOKSANGGUL
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala bimbingan dan petunjukNya sehingga Rancangan Akhir RENSTRA - SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan dapat disusun.

Untuk mewujudkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD serta surat Edaran Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 050/1936/Bappeda.Pem/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 Permintaan Renstra SKPD Perubahan Tahun 2016-2021 Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pembangunan Peternakan dan Perikanan, melalui Program Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang perlu ditetapkan suatu tatanan peranan dalam bentuk Renstra SKPD yang nantinya dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak atas saran dan masukan sehingga Rancangan Akhir RENSTRA ini dapat tersusun. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**



**LUHUT MARBUN,SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19621231 198702 1 019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari visi, misi kepala daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 – 2021.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari disusunnya dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan periode tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen perencanaan formal Organisasi Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembangunan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
9. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) ;
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 5) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).
23. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 52).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dokumen Renstra yang disusun dimaksudkan sebagai arah kebijakan dan target pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Humbang Hasundutan selama periode tahun 2016 - 2021, yang tetap mengacu pada tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 - 2021.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya, serta bersifat indikatif. Renstra juga merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan dan kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra ini, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 – 2021, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan, Dinas Peternakan dan Perikanan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian yang mencakup peternakan dan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Disnakkan ;
- b. Pelaksanaan DPA Disnakkan;
- c. Penyusunan kebijakan bidang peternakan dan perikanan ;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan perikanan ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan perikanan ;
- f. Pelaksanaan administrasi bidang peternakan dan perikanan ;
- g. Perumusan kebijakan bidang peternakan dan perikanan ;
- h. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan;
- i. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian serta penyediaan benih/bibit ternak, ikan dan pakan ternak ;
- j. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan ;
- k. Pelaksanaan penyuluhan bidang peternakan dan perikanan ;
- l. Pemberian rekomendasi teknis bidang peternakan dan perikanan ;
- m. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan ikan ;
- n. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat peternakan dan perikanan ;
- o. Pelaksanaan administrasi Disnakkan ;
- p. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya ;
- q. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Disnakkan.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi dan Perbibitan;
 2. Seksi Pengelolaan, Sarana dan Pemasaran;

d. Bidang Kesehatan hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

e. Bidang Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Budidaya Perikanan;
2. Seksi Penangkapan, Pengolahan dan Pemasaran

f. UPT Disnakkam;

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya uraian tugas masing-masing Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

I. Bidang Peternakan

1. Seksi Perbibitan dan Produksi, mempunyai fungsi pelayanan :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- Melakukan penyiapan bahan pengendalian, penyediaan dan peredaran bibit dan hijauan pakan ternak ;
- Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit dan hijauan pakan ternak ;
- Menyusun petunjuk teknis pengembangan teknologi produksi perbibitan dan pembibitan ternak ;
- Fasilitasi bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan dan produksi meliputi bibit, pakan, tenaga kerja, mutu, rekomendasi dan metode;
- Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian ;
- Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak dan bimbingan seleksi ternak bibit, recording, uji performans penerapan standar perbibitan dan pelestarian plasma nutfah;
- Melaksanakan kajian sistem informasi, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan ;
- Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbibitan dan produksi ;
- Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan perbibitan dan produksi serta analisis kebutuhan dan pengembangan perbibitan dan produksi peternakan;
- Melaksanakan koordinasi pelayanan pengembangan peternakan dengan sub unit kerja lain di Lingkungan dinas;

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan, sarana dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha peternakan skala kecil ;
- Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk peternakan;
- Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan ;
- Melakukan pemberian bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pengelolaan, sarana dan pemasaran meliputi sarana, tenaga kerja, mutu, rekomendasi dan metode;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan ;
- Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang peternakan ;
- Menyusun petunjuk teknis produksi dan perbibitan ;
- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penetapan potensi peternakan, kawasan industri peternakan rakyat dan pengawasan kawasan peternakan ;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan produksi dan perbibitan di bidang peternakan.

2. Seksi Pengelolaan, Sarana dan Pemasaran, mempunyai fungsi pelayanan :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan, sarana dan pemasaran di bidang peternakan;
- Melakukan pemberian fasilitas sertifikat unit usaha peternakan skala kecil;
- Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk peternakan;
- Melakukan penyiapan bahan bimbingan, pembinaan dan pengembangan ternak serta bahan pengolahan hasil peternakan ;
- Melakukan pemberian bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pengelolaan, sarana dan pemasaran meliputi sarana, tenaga kerja, mutu, rekomendasi dan metode;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan ;
- Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang peternakan ;
- Menyusun petunjuk teknis pengelolaan, sarana dan pemasaran peternakan ;
- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penetapan potensi peternakan, kawasan industri peternakan rakyat dan pengawasan kawasan peternakan ;
- Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
- Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan;

- Menyajikan potensi investasi usaha peternakan ;
- Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak ;
- Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan ;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan, sarana dan pemasaran hasil di bidang peternakan ;
- Melakukan dan mempersiapkan bahan rekomendasi usaha peternakan ;
- Melaksanakan pembimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran peternakan ;
- Memberikan dukungan penganekaragaman produk asal ternak kepada masyarakat dan instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengelolaan, sarana dan pemasaran ;
- Melakukan pelaporan harga pasar komoditi peternakan;
- Melaksanakan koordinasi pelayanan pengembangan peternakan dengan unit kerja lain di lingkungan dinas.

II. Bidang Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner

1. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan, mempunyai fungsi pelayanan :

- Menyusun bahan kebijakan pelayanan kesehatan hewan dan ikan ;
- Melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan hewan dan ikan ;
- Melaksanakan pencegahan, pemberantasan, pengobatan dan pengendalian penyakit hewan;
- Melaksanakan pengamatan penyakit hewan dan ikan;
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan vaksin dan obat hewan yang beredar di pasar ;
- Melaksanakan pembinaan, edukasi, informasi kesehatan ternak/hewan dan ikan ;
- Melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner ;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan hewan dan ikan;
- Mempersiapkan bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan, penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha penjualan obat hewan ;
- Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penertiban surat keterangan kesehatan hewan ;
- Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan ;
- Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular ;
- Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan

2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai fungsi pelayanan :

- Menyusun bahan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pelaksanaan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan ;
- Melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pelaksanaan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan;
- Melaksanakan pengawasan terhadap produk hewan dan ikan dan bahan asal hewan dan ikan yang beredar di pasar ;
- Melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- Melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- Mempersiapkan bahan penertiban rekomendasi tempat pemotongan hewan/ternak, tempat penjualan daging, produk asal hewan;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pelaksanaan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan;
- Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak , hygiene dan sanitasi usaha produk hewan ;
- Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil ;
- Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan ;
- Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan ;
- Melaksanakan dan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;

III. Bidang Perikanan

1. Seksi Budidaya Perikanan mempunyai fungsi pelayanan :

- Menyusun, merencanakan dan memetakan kawasan perikanan budidaya untuk pengembangan komoditi unggulan berdasarkan potensi wilayah ;
- Menyusun dan melaksanakan pola pengembangan perikanan budidaya yang tepat teknologi, tepat komoditi, dan tepat pasar untuk mencapai target produksi di sentra-sentra kawasan perikanan budidaya dan BBI ;
- Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi pengembangan perikanan budidaya;
- Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, perencanaan pengembangan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan ;
- Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan ;
- Melaksanakan pengawasan peredaran obat ikan kimia dan biologi dan peredaran ikan hidup bagi usaha perikanan budidaya;
- Memberdayakan masyarakat perikanan dalam pembuatan pakan ikan dengan gerakan pakan ikan mandiri ;

- Melaksanakan perekayasa teknologi perikanan budidaya ;
- Melaksanakan bimbingan, pembinaan, penyuluhan teknis perikanan budidaya dan menumbuhkembangkan kelompok pembudidaya ikan ;
- Melaksanakan dan memfasilitasi pengujian sertifikasi dan penyediaan benih dan induk unggul bagi pembudidaya ikan .

2. Seksi Penangkapan, Pengolahan dan Pemasaran

- Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi usaha-usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- Melaksanakan bimbingan, pembinaan, penyuluhan teknis penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta menumbuhkembangkan kelompok usaha bersama, kelompok pengolahan dan pemasaran serta kelompok masyarakat dan pengawas;
- Memberikan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- Melaksanakan kebijakan penggunaan peralatan untuk penangkapan ikan ;
- Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perairan umum daratan;
- Melaksanakan pembinaan teknis penangkapan ikan;
- Melaksanakan pengembangan dan rekayasa teknologi, penanganan, dan pengolahan ikan secara modern dan tradisional;
- Melaksanakan pengawasan mutu terhadap produk, tenaga, sarana prosedur dan metode pengujian terhadap pengolahan hasil perikanan;
- Melaksanakan analisis pasar, permodalan perkreditan kelembagaan usaha bidang perikanan;
- Melaksanakan penyebaran informasi investasi, permodalan, dan pemasaran hasil perikanan;
- Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang permodalan dan pemasaran hasil perikanan;
- Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan teknis serta promosi produk-produk olahan hasil perikanan serta peningkatan konsumsi makan ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan.

2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 52 Tahun 2016 adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 4 (empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, serta 8 orang Eselon IV yang terdiri dari 2 (dua) orang Kasubag, 6 (enam) orang Kepala Seksi dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu direncanakan sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Salah satunya dapat dilihat dari komposisi pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan pendidikan. Jumlah pegawai berlatar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, diharapkan dengan komposisi tersebut dapat memberikan andil yang cukup besar dalam peningkatan kinerja organisasi. Pada Tabel 2.1 dapat dilihat komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, dari 27 orang pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 66,67% atau 18 orang dan pegawai perempuan sebanyak 33,33 % atau 9 orang.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretariat	7	6	13
3	Bidang Peternakan	4	0	4
4	Bidang Perikanan	4	1	5
5	Bidang Keswanik dan Kesmavet	2	2	4
	Jumlah Total	18	9	27

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, tersebar dari jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Sarjana (S1) yang didominasi oleh lulusan Sarjana (S1) sebesar 62,96% atau 17 orang.

Rincian jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	Pendidikan			Jumlah
	S1	D3	SMA	
Kepala Dinas	1	-	-	1
Sekretariat	6	1	6	13
Bidang Peternakan	4	-	-	4
Bidang Perikanan	2	1	2	5
Bidang Keswanik dan Kesmavet	4	-	-	4
Jumlah Total	17	2	8	27

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan golongan/ruang, yaitu golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 18 orang dan golongan II sebanyak 8 orang.

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Unit Kerja	Gol/Ruang							
		IV/b	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	-	2	2	3	-	1	4	1
3	Bidang Peternakan	-	2	-	1	1	-	-	-
4	Bidang Perikanan	-	1	2	-	1	-	1	-
5	Bidang Keswanik dan Kesmavet	-	2	2	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	1	7	6	4	2	1	5	1

Selain pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dinas Peternakan dan Perikanan juga memiliki Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah 9 orang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, yang terdiri dari Penyuluh Perikanan Bantu sebanyak 2 orang, Petugas Balai Benih Ikan Pusuk I sebanyak 3 orang, Petugas Unit Pembibitan Peternakan Pusuk I sebanyak 2 orang, Petugas Rumah Potong Hewan Doloksanggul sebanyak 1 orang dan Juru Sembelih Halal sebanyak 1 orang. Sehingga total jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan berjumlah 36 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Adapun sarana / prasarana yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Jeep	1 unit		-	-
2	Pick Up	1 unit		-	-
3	Mobil Unit Kesehatan Hewan	1 unit		-	-
2	Sepeda Motor	22 unit	18 unit	-	4 unit
3	Genset	2 unit		-	-
4	Gerobak Dorong (Beko)	22 unit	2 unit	-	20 unit
5	Traktor	1 unit		-	-

6	Mesin Jahit Karung	1 unit	-	-	
7	Dryer	1 unit	-	-	
8	Mesin Pembersih Kandang	1 unit		-	-
9	Mesin Tik	8 unit	4 unit	-	4 unit
10	Kalkulator	8 buah	4 buah	-	4 buah
11	Filling Besi	21 unit	19 unit	-	2 unit
12	Lemari kaca	1 unit	-		-
13	Lemari kayu	11 unit	10 unit	-	1 unit
14	Alat Penghancur Kertas	1 unit		-	-
15	Meja	54 unit	46 unit		8 unit
16	Kursi	79 unit	70 unit	-	9 unit
17	Sofa	1 set		-	-
18	Mesin Potong Rumput	2 unit	-	-	
19	Lemari Es	13 unit		-	-
20	P.C. Unit	14 unit	4 unit	-	10 unit
21	Lap Top	18 unit	14 unit	-	4 unit
22	Printer	25 unit	6 unit	-	19 unit
23	Camera	6 unit	5 unit	-	1 unit
24	Mikroskop	3 unit		-	-
25	Proyektor	1 unit		-	-
26	Facsimile	1 unit		-	-
27	Freezer	1 unit	-	-	
28	Cooler Box	23 unit		-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Pada tahun 2015 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak sapi/kerbau di 9 kecamatan dengan jumlah ternak yang diinseminasi sebanyak 564 ekor yang merupakan hasil pelaksanaan Inseminasi Buatan ternak sapi dan kerbau reguler sebanyak 114 ekor dan untuk Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) ternak sapi dan kerbau sebanyak 450 ekor. Kegiatan Inseminasi Buatan ini merupakan salah satu cara yang dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah populasi dan mutu genetik ternak di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Hal ini tampak dari peningkatan Populasi ternak dari tahun 2014, seperti sapi potong pada Tahun 2014 populasinya adalah 1.225 ekor dan pada Tahun 2015 menjadi 1.282 ekor, atau meningkat sebesar 4,65 %. Sementara populasi ternak kerbau pada Tahun 2014 adalah 10.910 ekor dan pada Tahun 2015 menjadi 10.975 ekor atau meningkat sebesar 0,60 %. Untuk ternak babi populasinya pada Tahun 2014 sebesar 40.260 ekor dan pada Tahun 2015 menjadi 41.173 ekor atau meningkat sebesar 2,19 %.

Sementara untuk produksi daging pada Tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar 2,87 % dari tahun 2013 yaitu dari 654.400 ton menjadi 673.188 ton, dan pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan sebesar 5,33 % yakni dari 673.188 ton meningkat menjadi 709.097 ton, untuk produksi telur di Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari ternak ayam dan itik, sementara untuk produksi susu belum bersifat komersil karena peternak pada umumnya memelihara ternak kerbau dan sapi untuk diambil dagingnya.

Tahun 2015 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan juga melaksanakan kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Peternakan kepada Petani untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia petani peternak dalam hal pengolahan pakan ternak besar dengan metode fermentasi, amonisasi dan silase. Pelatihan ini dilaksanakan terhadap 20 petani peternak yang ada di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, kegiatan lain yang dilaksanakan adalah kegiatan pelatihan kader kesehatan hewan sebanyak 125 kader yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kader-kader kesehatan hewan.

Untuk peningkatan kesehatan hewan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, pada Tahun 2015 Dinas Peternakan dan Perikanan telah melaksanakan kegiatan pendataan HPR (Hewan Penular Rabies) yang mana telah terdata sebanyak 17.378 ekor ternak, untuk jumlah hewan yang tervaksin diantaranya hewan penular rabies sebanyak 11.878 (sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) ekor, untuk vaksinasi ternak kerbau sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, vaksinasi ternak babi sebanyak 42 (empat puluh dua) ekor, sedangkan vaksinasi ternak unggas sebanyak 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) ekor. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pelaksanaan sosialisasi rabies yang dilaksanakan di 34 (tiga puluh empat) sekolah di 3 (tiga) kecamatan, pelaksanaan pemeriksaan hewan qurban dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan yaitu kecamatan Doloksanggul, Pollung, Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang, serta Kegiatan pengiriman sampel darah hewan/ternak sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima).

Untuk produksi ikan pada Tahun 2015 sebesar 1.674,4 ton mengalami penurunan bila dibandingkan dengan produksi Tahun 2014 sebesar 2.139 ton. Hal ini disebabkan jumlah produksi ikan mas dan ikan nila yang menurun secara drastis sebesar $\pm 40 - 45$ % dimana menurut informasi dari masyarakat akibat semakin tingginya harga pakan ikan dan tingkat kematian benih ikan juga tinggi yang salah satunya diakibatkan oleh kabut asap yang terjadi pada tahun 2015 sehingga tingkat keasaman air kolam juga tinggi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kekebalan ikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengembangan peternakan dan perikanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait pengembangan peternakan dan perikanan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pembangunan peternakan dan perikanan sering mengalami permasalahan-permasalahan yang menghambat pengembangannya dan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan. Tantangan ini dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak dan berat untuk diselesaikan tanpa kerjasama semua pihak, baik dari pemerintah dan masyarakat. Dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat pun sangat penting bagi pembangunan yang lebih menyeluruh (*holistic*), terintegrasi, dan terarah.

Tantangan pada pembangunan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Rendahnya SDM petani peternak dan pembudidaya ikan dalam manajemen dan pelaksanaan peternakan, kesehatan hewan dan perikanannya;
2. Peternak dan pembudidaya ikan di Kabupaten Humbang Hasundutan masih didominasi usaha skala kecil;
3. Pemanfaatan lahan untuk peternakan dan perikanan masih terbatas;
4. Sistem upah untuk usaha budidaya masih rendah;
5. Harga produk ternak yang relatif fluktuatif;
6. Kenaikan harga produksi tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan ternak/ikan;
7. Petani Peternak belum melaksanakan sepenuhnya anjuran dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit hewan dalam kegiatan usaha peternakan dan perikanannya;
8. Terdapatnya tempat pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemerintah Daerah, sehingga tidak terpantaunya proses pemotongan hewan dan tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang menjamin bahwa daging yang dihasilkan memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi;
9. Masih adanya gangguan penyakit hewan yang menyebabkan terhambatnya pencapaian produksi peternakan, dengan penyakit yang dominan yaitu cacingan pada sapi, scabies pada ternak kerbau, sapi dan babi dan *newcastle disease* (ND), ngorok (CRD) pada unggas.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan ke depan sebagai berikut :

1. Kondisi geografis dan keadaan sosial masyarakat Humbang Hasundutan yang masih cenderung agraris. Dari aspek wilayah topografi Kabupaten Humbang Hasundutan terletak pada ketinggian 330 - 2.075 meter diatas permukaan laut dan kemiringan tanah yang tergolong datar hanya 11 persen, landai sebesar 20 persen dan miring / terjal 69 persen. Berdasarkan fisik maka permukaan tanah kebanyakan berbukit dan bergelombang, banyak terdapat lembah yang terjal dan mempunyai iklim yang sejuk termasuk tropis basah dengan suhu berkisar antara 17 c-29 c, luas wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebesar 251.765,93 Ha dengan luas daratan sebesar 250.271,02 Ha. Namun potensi sumber daya peternakan dan perikanan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan belum dimanfaatkan secara optimal;
2. Tersedianya teknologi peternakan dan perikanan
Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang peternakan dan perikanan membuka peluang dan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi dan pelayanan. IPTEK mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas SDM peternakan dan perikanan yang mempengaruhi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi terutama menggerakkan industri peternakan dan perikanan serta pengembangan pasca panen.
3. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat
Keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan juga sangat ditentukan oleh adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat yang merupakan implementasi dari kebijakan paradigma pembangunan yang partisipatif yaitu dari , oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Humbang Hasundutan cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari peranan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan di bidang peternakan dan perikanan antara lain terbentuknya kelompok-kelompok peternakan, kelompok-kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang setiap tahunnya terus bertambah/meningkat dari jumlah maupun kualitasnya.

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir yang akan menjadi dasar penyusunan rencana strategis dinas dalam menentukan target dan capaian kinerja dinas dalam lima tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Peternakan dan Perikanan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Humbang Hasundutan .

Permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain :

a. Masih terbatasnya jumlah dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang Peternakan dan Perikanan

Pada saat ini personil yang tersedia pada Dinas Peternakan dan Perikanan masih minim sehingga beberapa tugas atau pekerjaan harus dijabat secara rangkap. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja pelayanan yang ditargetkan karena tidak bisa dilakukan secara optimal. Bahkan secara umum pada setiap jabatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan ada yang tidak memiliki staf terutama di level eselon 4. Disamping itu masih kurangnya pelatihan / Diklat Teknis bagi personil yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan.

b. Kurangnya ketersediaan bibit ikan, ternak unggul dan Hijauan Pakan Ternak (HPT)

Dengan adanya keterbatasan bibit ikan, ternak unggul dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) tersebut maka untuk itu perlu dilakukan penyediaan calon induk unggul, pelaksanaan pembenihan yang baik dan benar, penanganan benih pasca panen secara baik dan benar);

c. Belum sempurnanya basis data dan informasi peternakan dan perikanan

Data serta informasi tentang peternakan dan perikanan masih terbatas dan belum tertata dengan baik dalam suatu system jaringan, sehingga sulit mengaksesnya untuk menetapkan suatu kebijakan. Selain itu tingkat akurasi dan validasinya belum optimal. Dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan, ketersediaan data yang akurat dan tidak kedaluarsa menjadi salah satu factor penting. Statistik Peternakan dan Perikanan yang ada saat ini dirasakan masih belum menyajikan data peternakan dan perikanan yang cukup akurat, lengkap dan detail. Masih terbatasnya data dan informasi mengenai potensi Peternakan dan Perikanan serta sosial ekonomi untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya peternakan dan perikanan bagi petani peternak, pembudidaya ikan dan nelayan.

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

a. Tata ruang wilayah peruntukan sektor Peternakan dan Perikanan belum terwujud dengan baik

Tata ruang peruntukan sektor peternakan dan perikanan sebagai bagian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya Peternakan dan Perikanan sampai saat ini belum terwujud dengan baik. Belum adanya tata ruang yang mengakomodir lahan usaha peternakan, budidaya perikanan dan perikanan tangkap sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (*spacing*) usaha peternakan, budidaya perikanan dan perikanan tangkap di suatu kawasan. Kondisi ini akan berakibat parah dengan munculnya konflik penggunaan ruang di kawasan Peternakan dan Perikanan sering terjadi karena belum adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang sebagai acuan sektor berkepentingan.

Disamping itu adanya kecenderungan untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan keserasian dan kelestarian tata ruang dan kelestarian ekosistem. Disamping itu tidak terpenuhinya investasi yang seharusnya dibutuhkan di sektor Peternakan dan Perikanan serta sulitnya melakukan investasi.

b. Terbatasnya permodalan

Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak, untuk mendukung usaha budidaya ternak, budidaya perikanan ataupun perikanan tangkap sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya.

c. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengembangan usaha peternakan dan perikanan

Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang teknik budidaya peternakan dan cara budidaya ikan yang baik dan benar (CBIB) serta Cara pembenihan Ikan yang baik dan benar (CPIB).

d. Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan

Pemasaran produk peternakan dan perikanan di pasar dalam negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (*buyer market*). Hal ini mengakibatkan harga jual produk peternakan dan perikanan seringkali kurang menguntungkan pihak produsen (petani peternak, nelayan dan pembudidya ikan). Ada tiga faktor utama yang membuat pemasaran produk peternakan dan perikanan masih lemah, yaitu *pertama*, masih lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera (*preference*) para konsumen. *Kedua*, belum memadainya sarana dan prasarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (*delivery*) produk peternakan dan perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu. *Ketiga*, Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengembangan usaha peternakan dan perikanan.

d. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan

Pendapatan/penghasilan petani ternak, pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah produk hasil peternakan dan perikanan sangat ditentukan oleh input berupa biaya-biaya produksi (sarana produksi). Adanya kecenderungan harga sarana produksi semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan semakin menurunnya keuntungan dan pendapatan. Kondisi ini sering mengakibatkan terjadinya keresahan di tingkat petani, nelayan dan pengolah produk hasil peternakan dan perikanan.

e. Belum menjadi sumber pendapatan

Mayoritas masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan masih mengutamakan sektor pertanian (hortikultura) sebagai sumber pendapatan utama sedangkan untuk usaha peternakan dan perikanan masih dijadikan sebagai usaha sampingan. Kondisi ini akan berakibat pada perubahan pola kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat yang menempatkannya sebagai sumber pendapatan utama, sehingga sektor lain termasuk didalamnya adalah sektor peternakan dan perikanan (nelayan dan pembudidaya) termarginalkan.

f. Perlunya optimalisasi kesehatan masyarakat veteriner

Dalam rangka optimalisasi kesehatan masyarakat veteriner, diperlukan adanya penambahan unit Rumah Potong Hewan sehingga konsumen akan mendapatkan produk bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal. Selain itu juga diperlukan peningkatan pengawasan terhadap obat hewan yang beredar di masyarakat.

g. Adanya ancaman penyakit yang strategis baik yang sporadi maupun exotis baik pada ternak besar, ternak kecil maupun unggas

Lalu lintas ternak antar kabupaten maupun antar propinsi memungkinkan adanya mutasi penyakit. Oleh karenanya, diperlukan adanya layanan Kesehatan Hewan terutama dalam melakukan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, dan bermutu serta dengan adanya pos kesehatan hewan (poskeswan) di kabupaten Humbang Hasundutan.

h. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu

Adanya pemanasan global mengakibatkan iklim maupun cuaca yang ada saat ini sulit terdeteksi dini sehingga sangat mengganggu pola usaha tani (ternak dan budidaya ikan) termasuk pola penangkapan ikan. Kondisi ini berakibat pada kegagalan usaha tani (ternak dan budidaya ikan) dan nelayan yang pada akhirnya menurunkan produksi dan tingkat pendapatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan yang dituangkan dalam strategi pembangunan jangka menengah daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 – 2025. Kajian arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah berupa tahapan pembangunan berdasarkan skala prioritas atau proses pembangunan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD ditujukan untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan relevansinya dengan rencana jangka menengah daerah yang akan disusun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021; bahwa Visi Kabupaten Humbang Hasundutan adalah **“MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 bahwa Misi Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baru
4. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan
5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang peternakan dan perikanan serta tugas pembantuan, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Disnakkan;
2. Pelaksanaan DPA Disnakkan;
3. Penyusunan kebijakan bidang peternakan dan perikanan;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi bidang peternakan dan perikanan;
7. Perumusan kebijakan bidang peternakan dan perikanan;
8. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan;
9. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian serta penyediaan benih/bibit ternak/ikan dan pakan ternak ;

10. Pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
11. Pelaksanaan penyuluhan bidang peternakan dan perikanan;
12. Pemberian rekomendasi teknis bidang peternakan dan perikanan;
13. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan ikan;
14. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat peternakan dan perikanan;
15. Pelaksanaan administrasi Disnakan;
16. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
17. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan.

Secara umum tugas Dinas Peternakan dan Perikanan terkait dengan pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 4 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu:

“Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan”

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah di sektor peternakan dan perikanan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Humbang Hasundutan yang dikaitkan dengan visi dan misi ke-4 pembangunan jangka menengah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan swasembada pangan Kabupaten Humbang Hasundutan

Sasaran : Meningkatnya jumlah produksi bahan pangan

Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan merata dari sisi produksi

Sasaran : Meningkatnya PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Peternakan dan Perikanan secara vertikal berada dibawah 2 kementerian dan 2 dinas provinsi, yaitu Kementerian Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk urusan pertanian (subsektor peternakan), Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk urusan kelautan dan perikanan.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah “**Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional**”. Untuk mencapai visi tersebut ada 3 misi utama, yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Strategi pembangunan kelautan dan perikanan dalam mencapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
2. Pemberantasan Perikanan Ilegal /*IIIU Fishing*;
3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan hasil perikanan;
4. Peningkatan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan dengan indikator :
 - a. Peningkatan produksi perikanan dari 12,4 juta ton menjadi 18,8 juta ton.
 - b. Peningkatan produksi hasil perikanan dari 22,4 juta ton menjadi 40-50 juta ton.
 - c. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan dari 52% menjadi 87%.
 - d. Pengembangan Pelabuhan Perikanan dari 21 unit menjadi 24 unit.
 - e. Peningkatan luasan kawasan konservasi laut dari 15,7 juta ha menjadi 20 juta ha.

Sinergitas pembangunan nasional khususnya di sektor perikanan dan kelautan sejalan dengan pembangunan di daerah. Hal ini terlihat dapat dilihat dari keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan perikanan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 - 2021 dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan perikanan khususnya dalam rangka peningkatan produksi hasil perikanan.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Pertanian adalah “**Terwujudnya Sistem Pertanian- Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani**”.

Sedangkan Misi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kedaulatan Pangan;
2. Mewujudkan Sistem Pertanian Bioindustri Berkelanjutan
3. Mewujudkan Kesejahteraan Petani
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.

3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah:

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung sebagai berikut :

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
2. Peningkatan dukungan perkarantinaaan
3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi
4. Pelayanan informasi publik
5. Pengelolaan regulasi
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
7. Pengelolaan perencanaan
8. Penataan dan penguatan organisasi
9. Pengelolaan sistem pengawasan

Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian nasional akan dapat tercapai ketika mendapat dukungan sinergitas pembangunan pertanian yang sejalan di daerah. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi daging sebagai salah satu komoditi di sektor peternakan maka pembangunan sektor peternakan sangat sejalan dengan arah pembangunan peternakan di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan sasaran strategis peningkatan produksi hasil produksi peternakan.

Faktor- faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L adalah :

1. Rendahnya SDM petani peternak dan pembudidaya ikan dalam manajemen dan pelaksanaan peternakan, kesehatan hewan dan perikananannya;
2. Kuantitas dan kualitas SDM aparat belum maksimal;
3. Peternak dan pembudidaya ikan di Kabupaten Humbang Hasundutan masih didominasi usaha skala kecil;
4. Pemanfaatan lahan untuk peternakan dan perikanan masih terbatas;
5. Sistem upah untuk usaha budidaya masih rendah;
6. Harga produk ternak yang relatif fluktuatif;
7. Kenaikan harga produksi tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan ternak/ikan;
8. Petani peternak belum melaksanakan sepenuhnya anjuran dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit hewan dalam kegiatan usaha peternakan dan perikananannya;
9. Terdapatnya tempat pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemerintah Daerah, sehingga tidak terpantaunya proses pemotongan hewan dan tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang menjamin bahwa daging yang dihasilkan memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi;
10. Masih adanya gangguan penyakit hewan yang menyebabkan terhambatnya pencapaian produksi peternakan, dengan penyakit yang dominan yaitu cacingan pada sapi, scabies pada ternak kerbau, sapi dan babi dan *newcastle disease* (ND), ngorok (CRD) pada unggas;
11. Kurangnya pengetahuan dan penerapan teknologi peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
12. Kurangnya ketersediaan bibit ikan, ternak unggul dan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
13. Belum adanya Master Plan pengembangan ternak dan perikanan;
14. Sistem logistik kegiatan budidaya ternak/ikan belum tertata dengan baik dan efisien;
15. Sarana dan prasarana pendukung peternakan, kesehatan hewan dan perikanan masih terbatas;
16. Belum optimalnya layanan Kesehatan Hewan terutama dalam melakukan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bemuat;
17. Belum tertatanya manajemen pelayanan kesehatan hewan yang baku;
18. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan hewan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036, Rencana Struktur Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi :

a) Sistem Perkotaan;

Rencana Sistem Perkotaan dibagi menjadi 3 (tiga) pusat pelayanan yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di Kecamatan Doloksanggul; Pusat Pelayanan Kawasan ((PPK) berada di Kecamatan Lintongnihuta, Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Baktiraja dan Pusat Pelayanan Lokal promosi (PKLp) berada di Kecamatan Lintongnihuta.

b) Sistem Perdesaan;

Rencana Sistem Pedesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi IKK Paranginan, IKK Pollung, IKK Onanganjang, IKK Sijamapolang dan IKK Tarabintang.

Selain Rencana Struktur Ruang, Kabupaten Humbang Hasundutan juga mempunyai Rencana Pola Ruang yang terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

1. Kawasan lindung terdiri dari:

- ✓ **Kawasan Hutan Lindung** dengan luas kurang lebih 58.488 (lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan) Hektar tersebar di seluruh kecamatan. Pada Kawasan Hutan Lindung terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluas kurang lebih 68,49 (enam puluh delapan koma empat sembilan) Hektar di Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Paranginan.
- ✓ **Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya** berupa kawasan konservasi bergambut dan resapan air. Kawasan konservasi bergambut dan resapan air adalah kawasan yang berada pada ketinggian 1.000 mdpl dan pada kelerengan 40% berada pada Kecamatan Paranginan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Pollung dan Kecamatan Doloksanggul.
- ✓ **Kawasan Perlindungan Setempat** meliputi sempadan danau di sepanjang pinggir Danau Toba di Kecamatan Baktiraja dan Kawasan sekitar mata air dan embung meliputi: 1) mata air dan embung Tambok Teni Hoda, Tambok Silaga, Tambok Siogung-ogung, dan Sosorniapoan yang berada di Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan; 2) mata air dan embung Tambok Tinombuk dan Tambok Barangan, berada di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung; 3) mata air dan embung Tambok Simarigung berada di Desa Hutajulu Kecamatan Pollung; 4) mata air dan embung Tambok Pandiangan berada di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung; 5) mata air dan embung Tambok Haumarimba berada di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung; 6) mata air dan embung Tambok Tolong berada di Desa Pandumaan Kecamatan Pollung; 7) mata air dan embung Tambok Nabolon berada di Desa Pearaja Kecamatan Doloksanggul; 8) mata air dan embung Tambok Hutagurgur dan Tambok Punjung berada di Desa Hutagurgur Kecamatan Doloksanggul; 9) mata air dan embung Tambok Sangge-sangge berada di Desa Sihite I Kecamatan Doloksanggul; 10) mata air dan embung Tambok Panahatan berada di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul; 11) mata air dan embung Tambok Sigarua berada di Desa Parbotihan Kecamatan Sijama Polang; 12) mata air dan embung Tambok Nagodang berada di Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang; dan

13) mata air dan embung Simarumbak-umbak berada di Desa Sitio II Kecamatan Lintong Nihuta; 14) aek Sitio-tio di Desa Siunong-unong Julu Kecamatan Baktiraja.

2. Kawasan Budidaya

- ✓ Kawasan Budidaya di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari:
- ✓ kawasan hutan produksi;
- ✓ kawasan hutan rakyat;
- ✓ kawasan perkebunan meliputi seluas 4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) Hektar, terdiri atas:
 - a. Zona I dengan komoditas berupa tanaman kopi, kemenyan dan tanaman perkebunan lainnya meliputi Kecamatan Paranginan, Baktiraja, Lintongnihuta, Doloksanggul, Pollung, Onan Ganjang, Sijamapolang, Pakkat sebagian dan Parlilitan.
 - b. Zona II dengan komoditas berupa komoditas tanaman karet, kakao, sawit, dan meliputi wilayah Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Tarabintang.
- ✓ kawasan pertanian terdiri dari:
 - a. tanaman pangan dengan luas kurang lebih 98.630 Hektar,
 - b. hortikultura yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten.
 - c. Perkebunan
 - d. Peternakan terdiri atas :
 - sentra peternakan sapi yang berada di Kecamatan Pakkat, Onan Ganjang, Sijama Polang, Parlilitan, Tarabintang, Doloksanggul dan Pollung;
 - sentra peternakan kerbau yang berada di Kecamatan Onan Ganjang, Doloksanggul, Pollung dan Sijama Polang;
 - sentra peternakan kuda yang berada di Kecamatan Sijama Polang dan Doloksanggul, Onan Ganjang dan Pollung;
 - sentra peternakan kambing yang berada di Kecamatan Pakkat dan Tarabintang;
 - sentra peternakan babi berada di Kecamatan Sijama Polang, Peranginan, Doloksanggul, Pakkat, Onan Ganjang dan Lintong Nihuta;
 - sentra peternakan ayam buras berada di Kecamatan Onan Ganjang, Sijama Polang, Lintong Nihuta, Doloksanggul, Parlilitan dan Tarabintang, Paranginan, Pollung;
 - sentra peternakan itik berada di Kecamatan Pakkat, Pollung, Parlilitan, dan Baktiraja serta Tarabintang;
 - sentra peternakan ayam ras petelur dan pedaging (potong) berada di Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang.

✓ kawasan perikanan

kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:

- a. Perikanan air tawar
- b. Pengolahan ikan adalah aktifitas perikanan terkait peningkatan nilai tambah terdiri atas:
- c. Perikanan tangkap

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi

Isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pertanian (peternakan) dan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021 yang meliputi:

1. Rendahnya SDM petani peternak dan pembudidaya ikan dalam manajemen dan pelaksanaan peternakan, kesehatan hewan dan perikananannya;
2. Kuantitas dan kualitas SDM aparat belum maksimal;
3. Peternak dan pembudidaya ikan di Kabupaten Humbang Hasundutan masih didominasi usaha skala kecil;
4. Pemanfaatan lahan untuk peternakan dan perikanan masih terbatas;
5. Harga produk ternak yang relatif fluktuatif;
6. Kenaikan harga produksi tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan ternak/ikan;
7. Petani Peternak belum melaksanakan sepenuhnya anjuran dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit hewan dalam kegiatan usaha peternakan dan perikananannya;
8. Terdapatnya tempat pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemerintah Daerah, sehingga tidak terpantaunya proses pemotongan hewan dan tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang menjamin bahwa daging yang dihasilkan memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi;
9. Masih adanya gangguan penyakit hewan yang menyebabkan terhambatnya pencapaian produksi peternakan, dengan penyakit yang dominan yaitu cacingan pada sapi, scabies pada ternak kerbau, sapi dan babi dan *newcastle disease* (ND), ngorok (CRD) pada unggas;
10. Kurangnya ketersediaan bibit ikan, ternak unggul dan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
11. Belum adanya Master Plan pengembangan ternak dan perikanan;
12. Sarana dan prasarana pendukung peternakan, kesehatan hewan dan perikanan masih terbatas;
13. Belum optimalnya layanan Kesehatan Hewan terutama dalam melakukan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bemuat;
14. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan hewan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan

Penetapan tujuan organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor – faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, karena dengan mengetahui faktor – faktor kunci keberhasilan berarti organisasi tersebut telah mengetahui kekuatan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan.

Dalam rangka pencapaian misi ” Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan “, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan swasembada pangan Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

” Meningkatkan Produksi Peternakan dan Perikanan”.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memenuhi kriteria ”SMART”, yaitu *Specific* (khusus), *Measureable* (terukur), *attainable* (dapat dicapai), *Realistic* (nyata) dan *Time bound* (tepat waktu).

Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas peternakan dan perikanan;
2. Meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan;
3. Meningkatnya produksi perikanan.

Kesesuaian Visi, Misi RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan menentukan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam visi misi Bupati terpilih. Adapun konsistensi tersebut dapat dijabarkan dalam matriks berikut:

		Meningkatnya produksi hasil peternakan	Daging (ton)	776,62	813,26	850,74	890,48	931,80
			Telur (ton)	248,10	268,58	290,88	315,19	341,70
		Meningkatnya produksi perikanan	Produksi ikan :	1.497	1.573	1.651	1.735	1.820
			Perikanan Tangkap (ton)	404	425	446	468	491
			Perikanan Budidaya (ton)	1.093	1.148	1.205	1.267	1.329

4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis. Penyusunan Strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai hendaknya didahului dengan identifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yakni dari lingkungan internal dan eksternal OPD. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity* dan *threats*).

Analisis SWOT merupakan jenis analisis yang digunakan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun pada saat bersamaan dapat meminimumkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis (strategi dan kebijakan) dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Berdasarkan analisis SWOT dengan faktor internal maupun eksternal yang sudah diidentifikasi (Kekuatan/*Strength*, kelemahan/*Weakness*, Kesempatan/*Opportunities* dan Ancaman/*Threats*), maka sasaran strategi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Strategi **S – O** yaitu strategi yang menggunakan Kekuatan untuk meraih Peluang
2. Strategi **W – O** yaitu strategi yang menekan Kelemahan untuk meraih Peluang
3. Strategi **S – T** yaitu strategi yang menggunakan Kekuatan untuk menghadapi Ancaman
4. Strategi **W - T**, yaitu strategi yang menekan Kelemahan untuk menghadapi Ancaman

Berdasarkan interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut, maka dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Analisis SWOT Lingkungan Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan

Internal Eksternal	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan. 2. Terpenuhinya Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran 3. Adanya kelembagaan petani peternak. 4. Komitmen pimpinan yang tinggi. 5. Adanya dukungan dana. 6. Tersedianya akses informasi ke provinsi dan pusat
Peluang (Opportunity)	Strategi -SO	Strategi (WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi SDA yang cukup luas untuk pengembangan. 2. Terbukanya peluang pasar global. 3. Respon petani peternak terhadap penerapan teknologi cukup baik. 4. Meningkatnya permintaan pasar 5. Program revitalisasi peternakan dan perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada serta kondisi positif yang terjalin secara vertikal maupun horizontal untuk pengembangan sektor peternakan dan perikanan; 2. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan konsolidasi kepemilikan lahan peternakan dan perikanan dalam bentuk kelompok sehamparan. 4. Menetapkan zona – zona peternakan dan perikanan. 5. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya lokal 6. Meningkatkan kualitas ASN dan Petani Peternak melalui pendidikan dan pelatihan.
Ancaman (Threats)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fluktuasi harga produksi yang tidak dapat dikendalikan 2. Lemahnya dukungan permodalan bagi petani peternak 3. Serangan penyakit hewan / ikan. 4. Masuknya produk luar daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkembangkan usaha agroindustri dan teknologi pasca panen. 2. Fasilitasi permodalan 3. Melaksanakan perlindungan terhadap komoditi peternakan dan perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya saing produk melalui pengolahan produk. 2. Mengintensifkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular. 3. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan

Berdasarkan analisis di atas, diperoleh alternatif strategi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada serta kondisi positif yang terjalin secara vertikal maupun horizontal untuk pengembangan sektor peternakan dan perikanan ;
2. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan;
3. Fasilitasi permodalan;
4. Melaksanakan perlindungan terhadap komoditi peternakan dan perikanan;
5. Melaksanakan konsolidasi kepemilikan lahan peternakan dan perikanan dalam bentuk kelompok sehamparan;
6. Menetapkan zona – zona peternakan dan perikanan;
7. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya lokal;
8. Meningkatkan kualitas ASN dan Petani Peternak melalui pendidikan dan pelatihan;
9. Meningkatkan daya saing produk melalui pengolahan produk;
10. Mengintensifkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular;
11. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan

Selanjutnya, dari 12 (dua belas) alternatif strategi tersebut, diformulasikan 5 (lima) pilihan strategi sebagai strategi OPD dalam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

- 1) Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan.
- 2) Meningkatkan kualitas ASN dan Petani Peternak melalui pendidikan dan pelatihan
- 3) Mengintensifkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular.
- 4) Melengkapi sarana / prasarana pendukung peternakan dan perikanan

Merujuk pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka arah kebijakan yang akan diterapkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi peternakan dan perikanan;
2. Peningkatan kompetensi ASN dan petani peternak;
3. Peningkatan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
4. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan.

BAB V

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan yang telah dibuat terarah dan jelas disertai indikator yang meliputi indikator program dan indikator kegiatan, indikator dan output memberikan gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan menghasilkan keluaran yang bermanfaat, saling terkait dan efektif.

Program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun akan menjadi acuan bagi Dinas Peternakan dan Perikanan dalam menyusun rencana tahunan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan. Penyusunan perencanaan yang berdasarkan indikasi diharapkan dapat memudahkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pelaksanaan program tahunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan berdaya guna bagi kepentingan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas peternakan dan perikanan;
2. Meningkatnya populasi ternak dan produksi hasil peternakan;
3. Meningkatnya produksi perikanan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Adapun program yang ditetapkan kurun waktu Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Program peningkatan Produksi Hasil Peternakan ;
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
3. Program Promosi Perikanan;
4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya;
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;

Adapun susunan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan pada Periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output)
Program peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi dan Produksi Ternak
1 Kegiatan Pengadaan pakan pada pilot project pembibitan peternakan pusuk I	Jumlah pakan ternak babi
2 Pengadaan Ternak	Jumlah ternak
3 Kegiatan Pembinaan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Petani Peternak	Jumlah kelompok tani peternak yang mendapatkan pembinaan (kelompok tani)
4 Kegiatan Pembuatan Master Plan Pengembangan Peternakan	Terlaksananya Pembuatan Master Plan Pengembangan Peternakan
5 Kegiatan Pelaksanaan IB dan Penerapan Teknologi Reproduksi Ternak	Jumlah kelahiran ternak hasil IB
7 Kegiatan Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Meningkatnya luas lahan HPT
8 Kegiatan Subsidi Pakan ternak	Jumlah Pakan Ternak untuk ternak bantuan Pemerintah
9 Kegiatan Pengadaan Aneka Ternak/Hewan Potensial	Jumlah Aneka Ternak/Hewan Potensial
10 Sensus Peternakan	One data
11 Kegiatan Pencegahan dan pengobatan penyakit hewan/ternak	Jumlah HPR, Jumlah Hewan terwasin dan jumlah hewan terobati
12 Kegiatan Promosi Kesehatan Hewan dan kesmavet	Jumlah Promosi yang dilaksanakan
13 Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan Hewan	Jumlah kader yang terlatih

14	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pemeriksaan Daging di RPH	Jumlah fasilitas Pemeriksaan Daging di RPH
15	Kegiatan Monitoring Pemotongan dan Peredaran Daging, Ikan dan Produk Olahannya	Jumlah daging, ikan dan produk olahan yang dimonitoring
16	Kegiatan Sosialisasi Produk Hewan Asuh	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi
17	Kegiatan Pembangunan Pos Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan	Jumlah Pos Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan
18	Kegiatan Pengadaan Peralatan Poskeswan	Jumlah Peralatan Poskeswan
19	Kegiatan Pengadaan vaksin, obat-obatan dan perbekalan kesehatan hewan	Jumlah Vaksin, Obat-obatan dan perbekalan kesehatan hewan
20	Kegiatan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dipelihara
21	Kegiatan Pengadaan Peralatan RPH	Jumlah Peralatan RPH
22	Kegiatan Pengadaan Kulkas dan Cooler Bag	Jumlah Kulkas dan Cooler Bag
23	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Inseminasi Buatan pada ternak sapi, kerbau dan babi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Inseminasi Buatan pada ternak sapi, kerbau dan babi
24	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Peternakan (ALSINNAK)	Jumlah Peralatan dan Mesin Peternakan (ALSINNAK)
25	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit Pembibitan Ternak Pusuk I	Jumlah Sarana dan Prasarana Unit Pembibitan Ternak Pusuk I
26	Kegiatan Pembangunan Pos IB	Jumlah Pos IB
27	Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan Biogas	Jumlah Usaha Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan Biogas
28	Kegiatan Pembuatan Sumber Air Tanah ,Instalasi air, Embung dan Sumur Resapan	Jumlah Sumber Air Tanah ,Instalasi air, Embung dan Sumur Resapan
29	Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Peternakan	Jumlah Jalan Produksi Peternakan
30	Kegiatan Pembangunan Kandang Usaha Peternakan	Jumlah Kandang Usaha Peternakan
31	Kegiatan Pembangunan pabrik Mini Pengolah Pakan Ternak	Jumlah pabrik Mini Pengolah Pakan Ternak

33	Kegiatan Pembangunan UPTD	Jumlah UPTD
34	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana UPTD
35	Kegiatan Pemeliharaan kandang beton , kandang kerangkeng, alat/mesin peternakan pada UPT Pusuk I	Jumlah kandang ternak dan alat/mesin peternakan pada UPT Pusuk I yang dipelihara
36	Kegiatan Pemeliharaan alat/mesin peternakan pada UPT Pusuk I	Jumlah alat/mesin peternakan pada UPT Pusuk I yang dipelihara
37	Kegiatan Rehabilitasi Kandang, Gudang, Lingkungan, Bak air, Bak Limbah dan Rumah Jaga Peternakan Unit Pembibitan Peternakan Pusuk I	Jumlah Kandang, Gudang, Lingkungan, Bak air, Bak Limbah dan Rumah Jaga Peternakan Unit Pembibitan Peternakan Pusuk I yang direhab
38	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Peternakan	Jumlah Kendaraan Operasional Peternakan yang terpenuhi
Program Pengembangan Budidaya Perikanan		Jumlah Produksi perikanan
1	Pengembangan Budidaya Ikan	Jumlah Rumah Tangga Produksi Perikanan (RTP)
		Jumlah Kolam Terpal
		Jumlah Mina Padi
		Jumlah Kolam Percontohan Budidaya Ikan Air tawar
		Jumlah Kolam Percontohan Budidaya Ihan
		Jumlah Lele Sistem Bioflog
		Jumlah pembudidaya yang terlatih
		Jumlah peserta yang mengikuti kunjungan kerja Konservasi Budidaya Ikan batak (jurung) ke BBAT Sukabumi
2	Kegiatan Pembinaan, monitoring dan evaluasi usaha perikanan	Jumlah RTP yang terbina
Program Promosi Perikanan		Angka Konsumsi Ikan Perkapita/Tahun
1	Kegiatan Pembinaan Pengolahan Ikan	Jumlah Kelompok pengolahan dan pemasaran (POKLAHSAR) yang mengikuti pembinaan pengolahan ikan
2	Kegiatan Pengadaan Bahan Promosi Perikanan	Jumlah Brosur dan Leaflet Perikanan serta Bahan Pameran
3	Kegiatan Lomba Masak Sunda Ikan	Jumlah Lomba Masak Sunda diikuti

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan sesuai analisa kebutuhan
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan ke Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Produksi Perikanan (RTP)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Fisik UPR yang terbangun/terehab
	Jumlah Sarana Pemasaran kendaraan roda 3
	Jumlah Peralatan Pengolahan Perikanan
	Jumlah Calon Induk Ikan untuk UPR
	Jumlah Pakan Ikan untuk UPR
	Jumlah Peralatan Perikanan untuk UPR
2 Pembangunan / Rehabilitasi UPTD / BBI Lokal	Jumlah UPTD / BBI Lokal
	Jumlah Bak Penampung Benih Ikan
	Jumlah Jalan Produksi BBI
	Jumlah Kolam BBI Pusuk I yang terpelihara
	Jumlah sarana dan prasarana fisik BBI yang terbangun/terehab
	Jumlah BBI Satelit yang terbangun
	Jumlah Saluran Air BBI yang terbangun
	Jumlah tanah untuk pembangunan BBI Satelit
	Jumlah Pembangunan BBI Satelit
	Jasa Konsultasi
	Jumlah Pos Pengawasan Perikanan
	Jumlah sarana dan prasarana pos pengawasan perikanan
3 Pengadaan sarana dan prasarana UPTD / BBI Lokal	Jumlah BBI Lokal
	Jumlah Peralatan pendukung pada Unit kesehatan ikan dan lingkungan level I

	Jumlah kendaraan Operasional Dinas BBI (roda 4)
	Jumlah Calon Induk Ikan untuk BBI
	Jumlah Pakan Ikan untuk BBI
	Jumlah Obat - obatan untuk BBI
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah jenis jasa Surat menyurat yang terpenuhi
2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi
3 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
4 Kegiatan Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan Kantor yang terpenuhi
5 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bahan dan material dan jasa service peralatan kantor
6 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
7 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi
8 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
9 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang terpenuhi
10 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi
11 Kegiatan Biaya Operasional Pengelola BBI	Jumlah operasional BBI yang terpenuhi
12 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang terpenuhi
13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang terpenuhi
14 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Perangkat Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung kantor
2 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BBI dan Unit Pembibitan Peternakan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga BBI dan Unit Pembibitan Peternakan
3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, taman, peternakan dan perikanan Pusuk I	Jumlah bangunan yang dipelihara
4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
5 Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Aparatur Perangkat Daerah memiliki kompetensi dibidangnya
1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
2 Kegiatan Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan pada Ternak Besar	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan pada Ternak Besar

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Jumlah Populasi Ternak ;
2. Jumlah Produksi Hasil Peternakan;
3. Jumlah Produksi Perikanan;

Untuk selengkapnya indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan kurun waktu Tahun 2016 – 2021 disajikan pada Tabel berikut.

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	324.361	367.805	386.181	405.474	425.732	447.004
1	Jumlah Populasi Ternak Kuda (ekor)	450	508	518	528	539	550
2	Jumlah Populasi Ternak Kerbau (ekor)	11.085	12.100	12.705	13.340	14.007	14.708
3	Jumlah Populasi Kambing (ekor)	2.074	2.712	2.848	2.990	3.140	3.297
4	Jumlah Populasi	1.370	1.413	1.484	1.558	1.636	1.718

5	Jumlah Populasi Ternak babi (ekor)	36.554	45.393	47.663	50.046	52.548	55.176
6	Jumlah Populasi Ternak ayam buras (ekor)	241.650	264.749	277.986	291.886	306.480	321.804
7	Jumlah Populasi Ternak itik (ekor)	31.178	40.930	42.977	45.126	47.382	49.751
B	Jumlah Produksi Hasil Pternakan						
1	Daging (ton)	949,467	776,62	813,26	850,74	890,48	931,80
2	Telur (ton)	200,274	248,10	268,58	290,88	315,19	341,70
C	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	1.052,6	1.497	1.573	1.651	1.735	1.820
1	Perikanan Tangkap (ton)	112,9	404	425	446	468	491
2	Perikanan Budidaya (Ton)	939,7	1.093	1.148	1.205	1.267	1.329

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Perikanan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 - 2021.

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016 – 2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Demikian Perencanaan Strategis ini dibuat untuk bahan dalam Penyempurnaan Program Pembangunan Peternakan dan Perikanan.

Doloksanggul,

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

LUHUT MARBUN, SP

PEMBINA TK.I

NIP. 19621231 198702 1 019

